



Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta

PENGEMBANGAN PERGURUAN TINGGI SWASTA YOGYAKARTA DALAM MENGHADAPI TANTANGAN GLOBAL

Rapat Koordinasi Pimpinan
PERGURUAN TINGGI SWASTA-KOPERTIS V DIY

Yogyakarta, 10 Oktober 2015

UNTUK membahas topik ini, setidaknya harus ada kesamaan pemahaman dulu tentang dua hal. *Pertama*, pemberlakuan liberalisasi pendidikan tinggi di antara negara-negara ASEAN di akhir tahun 2015 ini. *Kedua*, Undang-Undang RI Nomer 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dimana internasionalisasi (globalisasi) pendidikan tinggi itu termuat dalam Pasal-50 dan Pasal-90.

MEA: Peluang atautkah Ancaman?

Saat terintegrasinya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada Desember 2015 yang hanya kurang sekitar dua bulan lagi itu, tentu berpengaruh pada PTS. Kehadiran lembaga pendidikan dan tenaga kerja asing akan merubah peta persaingan, sehingga “*mau-tidak mau, suka-tidak suka*” –meminjam istilah Pak Harto—setiap PTS ditantang untuk meningkatkan mutu pendidikannya, baik dalam input, proses maupun output-nya. Dampak langsung yang dihadapi adalah diperlukannya penambahan modal kerja untuk biaya operasional, dan modal investasi untuk peningkatan kompetensi SDM dan pengadaan peralatan pendidikan.

Bagi PTS yang siap serta memiliki ijin operasional dan akreditasi minimum B punya peluang untuk melakukan *sister university* melalui kerjasama kemitraan dengan Perguruan Tinggi Luar Negeri (PTLN) yang terakreditasi baik di negaranya, dan dilaksanakan berdasarkan lima prinsip:

1. Kepentingan pendidikan dan peningkatan daya saing;
2. Kesetaraan dan saling menghormati;
3. Peningkatan mutu pendidikan tinggi melalui sinergi inovasi dan kreativitas yang memberikan nilai tambah;
4. Memberi manfaat yang berkelanjutan; dan
5. Mempertimbangkan keberagaman daerah.

Ada tiga jenis program penyelenggaraan program gelar, yaitu:

- Program Gelar Bersama (*Joint Degree*);
- Program Gelar Ganda Reguler (*Double Degree/Dual Degree*); dan
- Program Gelar Ganda Akselerasi (*Fast Track*).

Metoda pelaksanaan Program Kerjasama melalui:

- Program Ambil Kredit (*Credit Earning*);
- Program Alih Kredit (*Credit Transfer*);
- Program PT Kembar (*Twining/Sistership*);
- Program Pembimbingan Bersama dalam Riset (*Joint Supervision*); dan
- Program Pertukaran Mahasiswa (*Student Exchange*).

Selain memanfaatkan terbukanya peluang Kerjasama PTLN, bagi PTS yang siap, perubahan lingkungan strategis itu mestinya disikapi positif sebagai tantangan peningkatan mutu pendidikan, baik dalam profesionalisme manajerial maupun kompetensi akademiknya. Dalam hal ini kehadiran PTLN bisa berperan ganda, kooperatif dan kompetitif (*co-opetitive*). Sebagai mitra, berpotensi meningkatkan nilai tambah dan daya saing, sedangkan sebagai kompetitor, berpotensi melemahkan eksistensi PTS.

Selain itu, karena PTLN membawa standar dan orientasi pendidikan yang amat pro-pasar, maka perlu menjadi pemikiran bersama, bagaimana mengatasinya, baik saat berkompetisi maupun berkolaborasi, agar tidak mengancam eksistensi sistem pendidikan nasional kita.

Memang, sejak pembahasan RUU berikut sosialisasi UU-nya, internasionalisasi pendidikan tinggi menyisakan banyak pertanyaan, terutama dalam kaitan dengan eksistensi PTS, dan lebih khusus lagi, bagi PTS di bawah akreditasi B yang relatif lemah.

Jangan Jadi *Inlander*

Sebagai amanat UU, Kerjasama Internasional Pendidikan Tinggi itu merupakan proses interaksi dalam pengintegrasian dimensi internasional ke dalam kegiatan akademik agar mampu berperan dalam pergaulan internasional tanpa kehilangan nilai-nilai keIndonesiaan.

Artinya, Kerjasama PTLN jangan sampai meninggalkan jatidiri dan budaya bangsa. Sebaliknya, nilai-nilai lokal keIndonesiaan yang berbasis pada kearifan dan kecerdasan lokal –*local wisdom* dan *local genius*-- justru seharusnya lebih diperkukuh.

Para *founding fathers* memberi pelajaran amat berharga, ketika mengurai perbedaan melalui pertukaran pikiran tentang bagaimana cara menyerap progresivitas budaya Barat, seraya mempertahankan nilai-nilai keIndonesiaan. Misalnya, soal cara merebut “kemajuan” itu, apakah dengan membaurkan nilai-nilai Barat dan Timur, dan mengesampingkan tradisi, atau sebaliknya, bagaimana dan seperti apa “kemajuan” itu dirumuskan, dan seterusnya.

Dalam hal ini, menarik untuk mengangkat pendapat Prof. Soedijarto, Guru Besar Universitas Negeri Jakarta, dalam Kerjasama PTLN kita jangan jadi “*inlander*”, bahwa segala sesuatu dari asing selalu dianggap lebih baik. Wajar saja, jika pendidikan ditujukan setaraf mutu pendidikan luar negeri, tanpa harus menyebut berkelas internasional. Bukankah Harvard atau Oxford pun, juga tidak pernah mencantumkan sebagai Universitas Kelas Internasional.

Karena itu saya berharap, agar Kerjasama Internasional jangan sekali-kali meninggalkan konteks keIndonesiaan kita.

Peningkatan Tradisi Ilmiah

Dalam sebuah kerjasama, hendaknya mendalami makna ajaran Jawa, “*ngangsu apikulan warih*” –menimba dengan membawa air sebagai bekal. Sebelum bekerjasama, kita harus memiliki modal dasar dari sumber keilmuan sendiri, agar memiliki pijakan kokoh dalam kerjasama. Pasal 50 ayat (2) menyebutkan: Kerjasama Internasional didasarkan prinsip kesetaraan dan saling menghormati dengan mempromosikan iptek dan nilai-nilai kemanusiaan yang memberi manfaat bagi kehidupan.

Dalam proses interaksi itu yang amat berperan adalah kelompok minoritas kreatif, yakni kalangan pemikir dan peneliti, yang dituntut meningkatkan nilai tambah guna menumbuhkan Sivitas Akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif, seperti amanat UU.

Jika Kerjasama PTLN itu dianggap layakanya “dialog budaya ilmiah” dengan budaya luar, maka akan membuahkan dua hal yang saling berbalikan. **Pertama**, ke arah tradisi ilmiah dengan mengadaptasi nilai-nilai progresif keilmuan modern, maju dan unggul. Orientasi progresif itu dengan mempertajam rasio untuk mengejar kemajuan di bidang iptek dan ekonomi. **Kedua**, ke arah cara berpikir *western* yang berpotensi mendegradasikan nilai-nilai keIndonesiaan, karena permisif terhadap gaya hidup budaya Barat.

Dalam hal ini, pihak KOPERTIS dan APTISI supaya mewaspadai, agar Kerjasama PTLN itu diarahkan pada peningkatan tradisi ilmiah.

Dari *Teaching ke Research University*

Jika sebuah PTS bermaksud mengembangkan diri dari *Teaching University* menjadi *Research University*, maka harus ada perubahan-perubahan mendasar.

1. “Mencuri Resep”

Dengan mengambil analogi *Kentucky Fried Chicken* (KFC) sebagai model, dimana kesuksesannya didukung oleh resep. Tanpa resep KFC tidak beda dengan merk “KFC lain”, *Klaten Fried Chicken*. Kesuksesan PTS menghasilkan lulusannya bergantung pada “resep”-nya, dalam hal ini adalah **kurikulum**. Oleh sebab itu, secara berkesinambungan hendaknya PTS terus-menerus melakukan perbaikan (*continuous improvement*) kurikulum, mengadaptasi konsep *Kaizen* Jepang, disesuaikan dengan perkembangan dunia pendidikan.

PTS juga harus berani “*mengintip*”, bahkan “*mencuri*”, resep PTLN dalam *exchange program*. Apalagi jika ada kesempatan menjadi “*koki*” sebagai dosen. Ketika kembali dia tidak saja pernah “*mencicipi resep*”, tapi juga ikut “*memasak*”, karena beda antara mencicipi dan memasak. Tentunya “*restoran*” yang dituju adalah restoran yang memiliki kualitas baik.

Itulah sebabnya perlu membangun *sister university* dengan PTLN yang bagus-bagus, tidak sekadar universitas yang asal-asalan saja.

2. “*Three-A: Adopt, Adapt, Advance*”

Selain perlu resep, penghasil SDM bermutu adalah **kurikulum**, yang harus didukung *roadmap*. Sama seperti kurikulum, *roadmap* ini harus dibuat, diuji dengan cara diterapkan, direvisi, dan seterusnya. Setiap PTS hendaknya menyusun *roadmap* yang cocok untuk pedoman pengembangan akademiknya. Tidak berbeda dengan cara mengembangkan kurikulum, dengan “*mengintip dan mencuri*”, agar PTS bisa belajar dari PTLN yang memiliki *roadmap* baik, dengan magang di pusat penelitiannya, baik di PTLN atau pun industri. Cara ini dilakukan untuk “*jumping-start*” penelitian di PTS yang bersangkutan.

Namun dengan resep kurikulum dan *roadmap* saja belum menjamin kesuksesan. PTS bisa melihat kurikulum PTLN, tetapi hasilnya belum tentu sama. Seperti halnya jika mengetahui resep ayam KFC, juga belum tentu menjamin kesuksesan restoran kita, tanpa didukung oleh lisensi *franchising*.

Mestinya tidak cuma mengadopsi saja, tetapi dengan resep “*Three-A: Adopt, Adapt, Advance*”, untuk mengadaptasi dan mengembangkannya sebagai kekuatan yang khas sesuai tradisi ilmiah di PTS-nya sendiri.

3. *Good Corporate University*

Dengan hanya menjalankan Program 3-A itu, juga belum tentu sukses, karena masih memerlukan tata pengelolaan universitas yang baik (*good university governance*). Manajemen pendidikan dan penelitian adalah komponen penting, meliputi penjadwalan, pembuatan *rooster*, penugasan dosen, pembagian kelas, fasilitas pendukung perkuliahan, kebersihan kelas, proses pemasukan nilai, pergantian kelas, dan seterusnya. Dengan analogi KFC, yang menentukan kesuksesan adalah layanannya yang berbeda dengan *warteg*, misalnya.

Terkait dengan manajemen, ada **proses dan prosedur**. Misalnya ada proses *review* kurikulum, penilaian keberhasilan atau pendataan lulusan, dan seterusnya. Selain itu, yang juga tidak kalah pentingnya adalah **kultur**. Bahkan kultur ini adalah aspek terpenting!

PT lain bisa meniru kurikulum PTLN dan juga manajemennya, tapi hasilnya belum tentu sama, jika kultur akademiknya tidak kondusif¹.

Entrepreneurial University

Mengutip pemetaan Pearson dalam *Learning Curve Report 2014*, Prof. Suyanto² mengemukakan ciri-ciri kompetensi abad 21 yang perlu dikuasai Lembaga Pendidikan, termasuk PTS dan peserta didik, agar mereka bisa eksis dan berperan aktif di era global abad 21 ini. Karena itu PTS hendaknya mengembangkan 8 kemampuan ini: (1) *leadership*; (2) *digital literacy*; (3) *communication*; (4) *emotional intelligence*; (5) *entrepreneurship*; (6) *global citizenship*; (7) *problem solving*; dan (8) *team-working*.

Di sini hanya dibahas tentang perlunya spirit *entrepreneurship* itu di PTS, karena merupakan kata kunci untuk bisa memasuki 7 kriteria lainnya yang dipersyaratkan.

Sama halnya RS Sardjito yang berupaya menjadikannya *teaching hospital*, tidak berarti fungsinya dalam memberikan layanan kesehatan lalu berkurang. PTS yang ingin mengembangkan diri menjadi *research university*, tetap harus mengembangkan *teaching university*-nya. Dengan menjadi *research university* bukan meniadakan *teaching university*-nya, tetapi berekspansi memberikan fokus pada *research*-nya. Aspek *teaching* yang sudah sukses sangat sayang kalau dibuang. Apalagi jika sudah menemukan resepnya. Sangat disayangkan kalau restoran yang sudah terkenal kemudian *banting setir* untuk membuat pabrik, misalnya.

¹ Budi Rahardjo, *Towards a Research University*, 12 September 2004.

² Prof. Suyanto, PhD, *Tantangan Global Pendidikan*, Rubrik Analisis KR, 2 Mei 2015.

Sebagai contoh ITB yang sudah memutuskan untuk menjadi *research university* tahun 2005, 10 tahun yang lalu, untuk kemudian melompat menjadi *entrepreneurial university* tahun 2010, 5 tahun yang lalu.

Apakah ITB sebagai *research university*, apalagi *entrepreneurial university*, kedua tujuan itu juga sudah tercapai, silakan forum ini yang menjawabnya.

Pentingnya Pendidikan *Entrepreneurship*

Menurut Ir. Ciputra ada lima alasan mengapa *entrepreneurship* sangat penting diajarkan. *Pertama*, kebanyakan generasi muda tidak dibesarkan dalam keluarga yang memiliki budaya *entrepreneur*. Inspirasi dan latihan usaha juga tidak banyak diajarkan di bangku sekolah. *Kedua*, tingginya pengangguran, yang ditandai banyaknya sarjana dan lulusan diploma yang menganggur. *Ketiga*, lapangan kerja sangat terbatas, tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja.

Keempat, pertumbuhan *entrepreneur* selain dapat menampung tenaga kerja, juga dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat. *Kelima*, Indonesia sangat kaya dengan sumberdaya alam, tetapi belum bisa dikelola dengan baik karena kekurangan SDM *entrepreneur* yang mampu mengubah “*kotoran dan rongsokan menjadi emas*”.

Dan jangan salah, keberadaan *entrepreneur* tidak hanya diperlukan sebagai *business entrepreneur* saja, tetapi juga di bidang-bidang lain, sebagai *government entrepreneur* (Lee Kuan Yew), *social entrepreneur* (Mohammad Yunus), dan *academic entrepreneur* (Albert Einstein).

Untuk menuju terciptanya *entrepreneurial university*, Indonesia perlu melakukan *quntum leap* (lompatan kuantum), yang meliputi tiga gagasan.

Pertama, pada pendidikan dasar dan menengah harus ada kurikulum *entrepreneurship*. *Kedua*, *entrepreneur* harus diciptakan dan dikembangkan di level perguruan tinggi. *Ketiga*, harus terdapat gerakan pelatihan *entrepreneurship* di PT, khususnya PTS, yang didukung oleh APTISI dan KOPERTIS, agar menjangkau ke seluruh PTS yang siap.

Catatan Akhir

Dibanding negara lain, seperti Jepang atau Singapura, betapa mudahnya orang menjadi dosen di Indonesia. Hanya dengan gelar S1, sudah dapat menjadi dosen. Memang ke depan hanya yang bergelar doktor atau setidaknya kandidat doktor yang dapat menjadi dosen.

Berbeda dengan di Jepang. Seorang doktor dengan prestasi akademik yang baik pun dari Universitas Tokyo, misalnya, belum tentu bisa diterima mengajar di universitas almamaternya. Bisa jadi ia hanya menjabat sebagai dosen di sebuah universitas kecil. Memang, biasanya sulit untuk mencari lowongan kerja di universitas ternama. Dan kalau pun ada lowongan nanti, tingkat persaingannya pun sangat ketat.

Padahal di sini, seseorang dapat meraih jabatan Guru Besar tanpa harus memiliki prestasi yang istimewa dalam penelitian. Hanya dengan memiliki dua publikasi nasional sejak menjadi Lektor Kepala, seorang dosen dapat diusulkan (dan umumnya disetujui) menjadi Guru Besar, asalkan ia telah mencapai angka kredit 850 (kalau belum diubah).

Di Jepang, dengan kualitas minim seperti itu bahkan tidak layak untuk menjadi dosen. Memang, membandingkan dengan perguruan tinggi kita, ibarat membandingkan kucing dengan harimau. Sejenis tapi beda kelas. Maksudnya metafora itu untuk memberikan gambaran seberapa jauh *gap* mutu perguruan tinggi kita dari perguruan tinggi kelas dunia.

Logikanya, dengan dosen yang berkualitas rendah, apa yang dapat kita harapkan dengan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat? Memang banyak program studi yang mendapat akreditasi A atau B dari Badan Akreditasi Nasional-Perguruan Tinggi (BAN-PT), tetapi berapa di antaranya yang mendapat akreditasi dari lembaga akreditasi internasional?

Bila program studi unggulan di institusi ternama pun masih harus berjuang keras untuk meraih akreditasi internasional, bagaimana dengan program studi lainnya yang ditawarkan oleh dua ribuan perguruan tinggi antah-berantah yang tersebar di negara kita ini? Kualitas, dan juga kuantitas, dalam penelitian dan kontribusi pada pembangunan bahkan lebih menyedihkan lagi. Perguruan tinggi manakah, bila ada, yang dapat dipacu untuk menjadi kelas dunia?

Untuk mewujudkan visi menjadi universitas kelas dunia, agar siap menjawab tantangan global, diperlukan kerja ekstra keras dan waktu yang lama. Reformasi pendidikan tinggi merupakan keharusan, dan perlu belajar dari negara lain, seperti China, India, Korea Selatan, dan Malaysia, yang berhasil meningkatkan kualitas dan reputasi pendidikan tingginya. Namun, untuk menjadi salah satu dari sekian banyak perguruan tinggi terbaik dunia, kita perlu mempelajari karakteristik keunggulannya, dan sejak dini mempersiapkan diri dengan membuat *roadmap* ke arah sana.

Akhirnya harapan saya adalah: Semoga Rapat Koordinasi Pimpinan ini setidaknya mampu membangunkan kesadaran, membangkitkan inspirasi dan menggerakkan motivasi bagi PTS untuk mulai berbenah diri dengan memperkuat kemampuan dasarnya terlebih dulu, sebagai modal dasar dimilikinya keunggulan yang berkelanjutan.

Yogyakarta, 10 Oktober 2015

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X